

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kinerja belanja adalah ukuran atau indikator untuk menilai sejauh mana efisiensi pelaksanaan pengeluaran atau belanja anggaran pemerintah daerah. Kinerja belanja biasanya mencerminkan sejauh mana dana yang telah dialokasikan dalam anggaran digunakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan output yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024, kinerja belanja pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan belanja yang tidak stabil

Pertumbuhan belanja pemerintah daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Baik belanja operasi, belanja modal, maupun total belanja menunjukkan pola yang tidak konsisten, tergantung pada kebutuhan dan prioritas kebijakan di masing-masing tahun. Tahun 2021 mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan, dipicu oleh restrukturisasi organisasi dan kebijakan pemulihan pasca Covid-19.

2. Efisiensi anggaran belum optimal

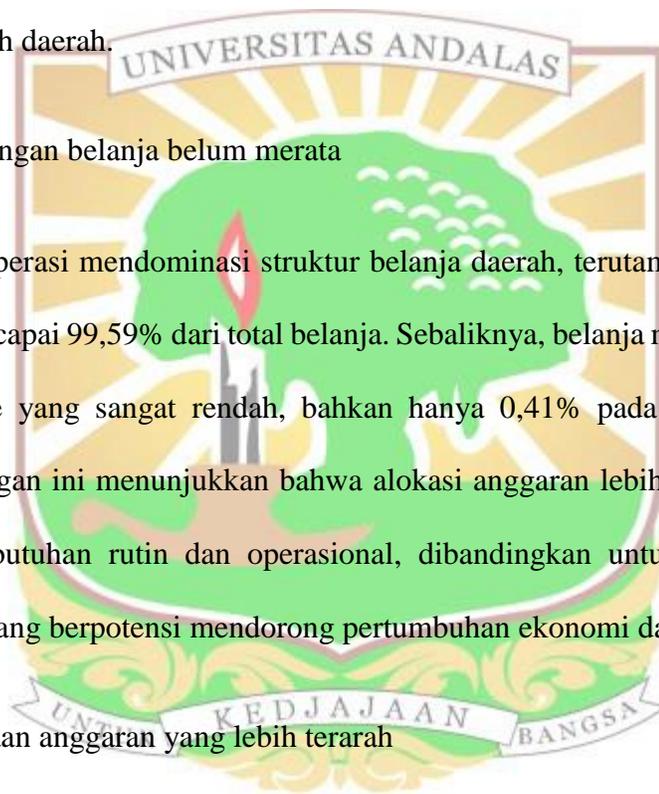
Rasio efisiensi belanja menunjukkan kecenderungan kurang efisien, dengan persentase di atas 90% setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya hemat dan belum menunjukkan efisiensi maksimal, sehingga masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam manajemen keuangan pemerintah daerah.

3. Keseimbangan belanja belum merata

Belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah, terutama pada tahun 2024 yang mencapai 99,59% dari total belanja. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan persentase yang sangat rendah, bahkan hanya 0,41% pada tahun yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin dan operasional, dibandingkan untuk investasi jangka panjang yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Perencanaan anggaran yang lebih terarah

Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih strategis, terukur, dan berorientasi pada efisiensi serta keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Pemerintah daerah perlu meninjau ulang struktur alokasinya agar tidak hanya fokus pada pembiayaan rutin, tetapi juga pada belanja pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang.



5.2 Saran

1. Peningkatan Efisiensi Anggaran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan, pengurangan anggaran yang tidak prioritas, serta penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat.

2. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Disarankan agar perencanaan anggaran lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk memastikan alokasi dana benar-benar sejalan dengan capaian output dan outcome yang diharapkan. Dengan begitu, efektivitas program pembangunan daerah dapat lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyeimbangkan Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pemerintah daerah perlu memperbaiki keseimbangan belanja dengan memperbesar porsi belanja modal secara proporsional. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan melalui investasi aset tetap yang berdampak jangka panjang, seperti infrastruktur, teknologi, dan fasilitas publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana dan Pengelola Anggaran

Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BAPPEDA dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Pelatihan teknis dan penguatan kapasitas analitis akan membantu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen Anggaran.

Penggunaan sistem informasi dan digitalisasi dalam manajemen keuangan daerah dapat membantu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.



